

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

2.1 Deskripsi Kabupaten Bantul

Karakter Kabupaten Bantul dengan kondisi serta kualitas moral masyarakat yang positif, dapat bersosialisasi dengan baik antar sesama manusia sehingga terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Konsep budaya Daerah Istimewa Yogyakarta mampu membuat interaksi budaya melalui proses akulturasi dan inkulturasi dapat memperkokoh budaya lokal, mengembangkan budaya masyarakat yang kreatif dan keunggulan lokal. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang mengalami peningkatan dengan lebih merata dan menurunkan ketimpangan antara masyarakat dan menurunnya ketimpangan wilayah.

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta disebelah Utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, disebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul serta sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo. Luas wilayah Kabupaten Bantul sendiri sebesar 506.85 km² dengan topografi dataran rendah dan selebihnya daerah perbukitan yang kurang subur dengan beberapa wilayah yang berpasir dan berpantai dengan terbentang dari pantai selatan di Kecamatan Srandakan, Sranden, dan Kretek.

Kemandirian masyarakat Kabupaten Bantul merupakan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu dalam mengambil tindakan dan menangani masalahnya, serta mampu berkontribusi dan merespon terhadap pembangunan berkelanjutan serta berkembang zaman yang secara otonomi mengandalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Kebutuhan masyarakat yang relatif terpenuhi maka masuk kedalam masyarakat yang sejahtera dalam spiritual maupun material secara layak sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

1.5.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bantul

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Sehat dengan masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial, kepeduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong, adanya rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-

sama mewujudkan pembangunan, serta warga Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

b. Misi

Adapun misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empati.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

2.2 Perekonomian Kabupaten Bantul

Pertumbuhan ekonomi dengan potensi yang cukup besar di Kabupaten Bantul mampu untuk terus di tumbuh kembangkan berbagai kegiatan industri kreatif. Pemanfaatan berbagai sumber daya serta kemajuan masyarakat dapat membuat perkembangan perekonomian daerah ke arah yang lebih baik. Pendapatan daerah akan meningkat dan masyarakat akan dapat menikmati pembangunan yang terus berkembang.

Pembangunan ekonomi yang terus dikembangkan memerlukan berbagai kegiatan yang dapat terus mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi. Untuk memanfaatkan besarnya potensi yang dimiliki oleh daerah serta untuk terus meningkatkan kontribusi perekonomian terhadap pembangunan daerah merupakan kerja sama dari berbagai kalangan untuk dapat mengembangkan dalam pembangunan ekonomi. Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat melalui neraca ekonominya seperti tercermin dalam Produk Domestik suatu daerah. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan penduduk adalah dengan melihat hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto yang ditetapkan berdasarkan pada Harga Berlaku dan Harga Konstan.

Tabel 2.1 Produktivitas Per Sektor Kabupaten Bantul Tahun 2010-2012

No	Sektor	2010	2011	2012
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PDRB	3.967.928	4.177.204	4.400.313
2	Jumlah Angkatan Kerja	481.420	505.786	581.785
3	Pertanian	933.260	920.457	957.730
4	Pertambangan dan Penggalian>	36.525	38.782	35,786
5	Industri Pengolahan	647.939	690,977	701,762
6	Listrik, Gas & Air Bersih	36.289	37.969	40.373
7	Konstruksi	454.480	486.930	511.749
8	Perdagangan, Hotel & Restoran	789.789	839.997	893.854
9	Pengangkutan & Komunikasi	287.236	311.285	333.688
10	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	252.015	279.556	305.347
11	Jasa-Jasa	530.397	571.248	614.888

Kemiskinan yang merupakan masalah yang sering ditemui di Indonesia dimana masih termasuk dalam negara berkembang. Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di berbagai daerah membuat banyak dari daerah di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam proses pengurangan kemiskinan. Namun dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat serta jumlah lapangan kerja yang akan banyak bermunculan seiring dengan berkembangnya industri kreatif akan mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah.

2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dari sebuah proses yang di dalamnya memiliki misi dan tujuan yang sangat tergantung dengan sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan pembangunan ke arah yang lebih baik. Dengan sumber daya

alam yang mumpuni dan baik akan memberikan kontribusi yang terhadap proses pembangunan. Sumber daya manusia yang dapat bersaing dan mampu untuk mengembangkan kreatifitasnya memungkinkan untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan dan memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.2 Angka Melek Huruf Tahun 2010 - 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Presentase Melek Huruf (%)	91,03	91,23	92,19	97,51	97,63

(Sumber : Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, 2015)

Salah satu hal penting yang menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Bantul adalah pada sektor pendidikan. Sarana pendidikan yang memadai akan dapat memacu peningkatan kualitas dari Sumber Daya Manusia terutama bagi generasi muda. Kualitas Sumber Daya Manusia sangat diperlukan dalam menjelang dan menghadapi era globalisasi, terutama menghadapi pasar bebas. Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia diharapkan pula bersamaan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki Sumber Daya Manusia. Sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Bantul mulai dari pendidikan non-formal (PAUD dan TK) sampai dengan perguruan tinggi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, serta kursus-kursus ketrampilan yang semakin banyak berkembang di Bantul.

Tabel Angka Melek Huruf Tahun 2010 - 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Presentase Melek Huruf (%)	91,03	91,23	92,19	97,51	97,63

Sumber : Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, 2015

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal maupun informal menjadi tujuan utama pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini bisa dibuktikan dengan prestasi yang ditorehkan pelajar Kabupaten Bantul di tingkat provinsi maupun nasional. Prestasi ini tidak bisa lepas dari peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu didukung oleh sejumlah Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Bantul antara lain adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, Universitas PGRI, STMIK AKAKOM, STIKES Surya Global, Akademi Teknologi Kulit, dan lain-lain.

1.4 Industri Kreatif

Perkembangan industri kreatif di Kabupaten Bantul dengan berbagai upaya guna mewujudkan tatanan perekonomian yang dapat berpihak terhadap kepentingan masyarakat serta keadilan sosial, seluruh kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan kepentingan golongan kelompok tertentu maupun individu, dengan proses dan hasil yang dapat melibatkan semua orang dan hasilnya dapat dinikmati oleh

seluruh rakyat Indonesia. Jenis usaha yang banyak dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul terkait dengan industri kreatif, dengan melihat banyaknya potensi-potensi karya pengrajin yang terus dikembangkan pemerintah.

Perkembangan globalisasi serta liberalisasi membawa berbagai perubahan yang sangat cepat dengan berdampak kepada perekonomian nasional. Pengaruh yang paling terasa adalah terjadinya persaingan yang semakin ketat, di sisi lain adanya kolaborasi sehingga pembangunan industri perlu dukungan dengan kebijakan yang sesuai, perencanaan terpadu, serta efisiensi dalam pengelolaan dengan adanya prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Landasan hukum terkait dengan pembangunan sektor industri sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33. Namun, landasan hukum tersebut tidak lagi memadai untuk perindustrian sehingga perlu kebijakan baru untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal.

Potensi industri kreatif saat ini cukup besar berdasarkan sumber daya alam yang terbatas di Kabupaten Bantul maka akan bermunculan ide-ide kreatif yang di latarbelakang dari budaya masyarakat. Bahwa, dengan kondisi alam yang tidak banyak tersedia muncul adanya upaya mencari jalan keluar terkait dengan permasalahan yang ada, budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang pantang menyerah, kerja keras membuat masyarakat memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa dalam

bidang kreativitas yang dapat terus dikembangkan dan dapat memajukan perekonomian daerah.

Pengembangan industri kreatif oleh pemerintah Kabupaten Bantul telah sejalan dengan strategi pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat sudah semakin menaruh perhatiannya terhadap industri kreatif. Sedikitnya ada Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Komunikasi dan Informasi, dan Departemen Tenaga Kerja. Dalam rencana pengembangan ekonomi kreatif Indonesia tahun 2025 yang dirumuskan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia dijelaskan adanya evaluasi ekonomi kreatif. Ada 16 subsektor industri kreatif menurut data Badan Ekonomi Kreatif, yaitu sebagai berikut : aplikasi dan game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, seni pertunjukan, seni rupa, periklanan, televisi dan radio.

Kontribusi industri kreatif di Kabupaten Bantul yaitu dalam aspek penyerapan tenaga kerja dalam industri tersebut. Berdasarkan data Disperindag dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 154.392 orang yang tersebar di Kota dan Kabupaten dalam berbagai cabang industri kreatif. Di Kota Yogyakarta, 80 persen tenaga kerja pada sektor industri

kreatif bekerja pada industri kerajinan dan *fashion*. Seperti halnya Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, di Kabupaten Sleman, sebagian besar penduduk bekerja di industri kerajinan yaitu sebanyak 25.545 orang dan di Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 25.898 orang.

Tabel 2.3 Kontribusi Industri Kreatif Dalam Perekonomian

No.	Aspek	Bentuk Kontribusi
1.	Kontribusi Ekonomi	Peningkatan PDRB, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor non-migas
2.	Dampak Sosial	Meningkatnya kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, peningkatan toleransi sosial
3.	Inovasi dan kreativitas	Berkembangnya ide dan gagasan, meningkatnya penciptaan nilai
4.	Sumber Daya Terbarukan	Produk yang dihasilkan berbasis pengetahuan, komunitas dan tercipta <i>green community</i> .
5.	Iklm Bisnis	Terjadi penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatnya aktivitas pemasaran, dan terciptanya keterkaitan antar sektor
6.	Citra dan Identitas Bangsa	Munculnya ikon nasional, meningkatnya daya tarik pariwisata, membangun kebudayaan, pelestarian warisan budaya

No.	Aspek	Bentuk Kontribusi
		dan nilai lokal

(Sumber : Naskah Akademik Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil DPRD DIY Tahun 2017)

Dari tabel 2.3 tersebut dapat dilihat bahwa peranan ekonomi kreatif dalam perekonomian tidak saja dalam kontribusi ekonomi secara langsung, namun juga meliputi banyak aspek. Adapun inisiatif dari pemerintah untuk mengembangkan industri kreatif dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut yang memuat mengenai ringkasan dari berbagai kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

Tabel 2.4 Peraturan / Kebijakan Terkait Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif

Peraturan/Kebijakan	Keterangan
Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	Bab VI Pasal 17 menyatakan bahwa desain produk industri mendapat perlindungan hukum
Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Menyatakan bahwa desain produk industri dalam Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual
Keputusan Menteri Perindustrian dan	Pembentukan Dewan Desain Nasional/Pusat Desain Nasional

Peraturan/Kebijakan	Keterangan
Perdagangan No. 20/MPP/Kep/I/2001	(PDN)
Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif	Memuat definisi ekonomi kreatif, klasifikasi subsektor industri kreatif, pembentukan tim koordinasi pengembangan ekonomi kreatif dan sasaran, arah dan strategi pengembangan ekonomi kreatif 2015-2019
Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif	Kepala Badan Ekonomi Kreatif dijabat oleh Triawan Munaf

(Sumber : Naskah Akademik Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil DPRD DIY Tahun 2017)

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat dilihat beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat memberikan fasilitas bagi industri kreatif. Arahan Presiden terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta yang diharapkan dapat tumbuh menjadi kota kreatif, menjadikan banyak peluang yang harus tanggap dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan terkait pelaku industri kreatif yang dapat terus dikelola dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah, pemerintahan kabupaten dan pemerintah desa. Untuk terus meningkatkan pengelolaan industri kreatif

pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pihak lain guna mengakses kegiatan-kegiatan industri kreatif, satunya bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan terkait dengan ekonomi kreatif.

Tabel 2.5 Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kreatif di Kabupaten Bantul tahun 2015

No.	Cabang Industri	Kab. Bantul
1	Desain	33
2	Fesyen	8.659
3	Kerajinan	46.988
4	Layanan Komputer dan Piranti Lunak	109
5	Permainan Interaktif	8
	JUMLAH	55.797

(Sumber : Naskah Akademik Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil DPRD DIY Tahun 2017)

Berdasarkan tabel 2.5 dapat dilihat beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat memberikan fasilitasi bagi industri kreatif. Arahan Presiden terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta yang diharapkan dapat tumbuh menjadi kota kreatif, menjadikan banyak peluang yang harus tanggap dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan terkait pelaku

industri kreatif. Untuk terus meningkatkan pengelolaan industri kreatif pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pihak lain guna mengakses kegiatan-kegiatan industri kreatif, satunya bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan terkait dengan ekonomi kreatif.

1.5 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

a. Visi

“Produk Bantul Menjadi Produk Unggulan Di Indonesia”

b. Misi

1. Mewujudkan Koperasi Yang Sehat Dan Mandiri Untuk Kesejahteraan Anggota.

2. Mewujudkan Kreativitas, Daya Saing Produk UKM Dan Penguatan Kelembagaan UKM.
3. Mewujudkan Industri Yang Berdaya Saing Tinggi, Berkualitas, Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Sarana Dan Infrastruktur Industri Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Industri Yang Berwawasan Lingkungan.

Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi sumber daya mineral.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi sumber daya mineral.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi sumber daya mineral.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.5.1 Susunan Organisasi Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian Kabupaten Bantul :

1. Kepala Dinas : Drs. Sulistiyanto, M.Pd
2. Sekretaris Dinas : Dra. Annihayah, M.Eng
 - a. Kasubag Umum Dan Kepegawaian : Murniati Wismandari, AP, MM
 - b. Kasubag Program : Siti Sumiyati, S.AP
 - c. Kasubag Keuangan Dan Aset : Sri Pangestuti, SE, MM
3. Kepala Bidang Koperasi : Besari Setyowati, SE, MAP
 - a. Kasi Kelembagaan : Surono, BA
 - b. Kasi Pengawasan : Dewi Nurharjanti, SE, M.Si
4. Kepala Bidang UMKM : Juwahir, SE, MM
 - a. Kasi Pemberdayaan : Eny Kurnia Prihatini, SE
 - b. Kasi Pengembangan : Haryana, SIP
5. Kepala Bidang Produk Industri : Ir. Suryono, M.Si
 - a. Kasi Pengembangan Produk Fungsional : Galuh Hajeng Fitria, SSTP, M.Eng
 - b. Kasi Pengembangan Produk Pangan : Ir. Suprihadi, MMA

6. Kepala Bidang Sarana Dan Infrastruktur Industri : Tri
Murdianani, SE, MM
 - a. Kasi Pengembangan Sarana Infrastruktur Dan Industri : Drs.
Agus Suharja
 - b. Kasi Standarisasi Industri Dan ESDM : RE. Haryana S A, SH

7. Jabatan Fungsional.